



## Mengukur Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antarprovinsi di Pulau Sumatra dan Jawa

Abd Hakim Aflaha<sup>1\*</sup>, Zulgani<sup>2</sup>, Rosmeli<sup>3</sup>, Siti Hodijah<sup>2</sup>, Nurhayani<sup>5</sup>  
1,2,3,4,5 Universitas Jambi

\*Corresponding author, email : [hakimdeska25@gmail.com](mailto:hakimdeska25@gmail.com), [gzulgani@gmail.com](mailto:gzulgani@gmail.com),  
[rosmeli@unja.ac.id](mailto:rosmeli@unja.ac.id), [sitihodijah@unja.ac.id](mailto:sitihodijah@unja.ac.id), [nurhayani@unja.ac.id](mailto:nurhayani@unja.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

**Regional Inequality, Sumatra, Java**

### ABSTRACT

*This study aims to (1) analyse the level of development inequality between provinces in Sumatra and Java. The study uses secondary data obtained from Statistics Indonesia. The results show that North Sumatra, South Sumatra, and Riau Islands are classified as having high inequality, while Aceh, Riau, Jambi, and Bengkulu are classified as having moderate inequality, and West Sumatra, Lampung, and Bangka Belitung Islands are classified as having low inequality. In general, inequality on the island of Sumatra is classified as moderate, while on the island of Java it is classified as high due to economic concentration in industrial areas such as Jakarta and East Java*

#### Turabian style in citing this

article: [citation Heading]

Faisal Hamid, Erni Achmad,

Zainul Bahri, Siti Hodijah,

Nurhayani" Pendapatan

Pinang di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat" *Journal of*

*Sharia Economics* 7, No. 2 Dec:

2025

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga kini, pemerataan pembangunan masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ekonomi wilayah, ketimpangan pembangunan menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan tersebar secara merata di antara wilayah yang berbeda.

Menurut (Todaro & Smith, 2015), pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional semata, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat

dan wilayah. Ketimpangan wilayah terjadi ketika ada perbedaan signifikan dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, infrastruktur, dan kualitas hidup antar daerah. Dalam pandangan (Arsyad, 2010), ketimpangan wilayah muncul karena adanya perbedaan potensi sumber daya alam, lokasi geografis, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pembangunan yang cenderung berpihak pada wilayah tertentu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025b), kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih didominasi oleh wilayah barat, terutama Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, yang menyumbang lebih dari 75% total PDB nasional. Sementara itu, wilayah Indonesia bagian timur hanya berkontribusi sekitar 20%. Fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia belum merata antarwilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi, industri, dan investasi masih terpusat di daerah-daerah dengan infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik, seperti Pulau Jawa.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Kuncoro, 2020), yang menjelaskan bahwa pola pembangunan di Indonesia memiliki kecenderungan sentralistik, di mana daerah dengan fasilitas infrastruktur dan akses transportasi yang baik cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal. Hal tersebut memperkuat kesenjangan antarwilayah karena wilayah yang maju semakin berkembang, sementara wilayah yang tertinggal semakin terpinggirkan.

Dari tingkat nasional, ketimpangan pembangunan semakin nyata ketika dibandingkan antar pulau, khususnya antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kedua wilayah ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, tetapi menunjukkan karakteristik dan tingkat kemajuan yang berbeda. Pulau Jawa berperan sebagai pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan nasional. Infrastruktur transportasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan aktivitas ekonomi yang terdiversifikasi menjadikan Pulau Jawa sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sebaliknya, Pulau Sumatra yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan hasil perkebunan, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal pemerataan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan wilayah.

Menurut (Sjafrizal, 2014), perbedaan kemampuan ekonomi antarwilayah di Indonesia banyak disebabkan oleh struktur ekonomi yang berbeda. Pulau Jawa memiliki basis ekonomi sekunder dan tersier yang kuat, sementara Sumatra masih bertumpu pada sektor primer. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadikan perekonomian Sumatra lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan kurang memberikan nilai tambah yang besar terhadap pembangunan manusia.

## **METODE**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data yaitu tahun 2011-2024 dan data wilayah provinsi adalah provinsi di Pulau Sumatra yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Kemudian provinsi di pulau Jawa, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk menjawab rumusan masalah pertama diketahui Rumus Indeks Williamson, yang digunakan untuk menganalisis serta mengukur ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa periode 2011-2024, untuk rumus indeks williamson ini dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f/n)}{y}}$$

Di mana:

$y_i$  = PDRB per kapita daerah I (provinsi)

$y$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah (pulau sumatera, pulau jawa)

$f_i$  = Jumlah penduduk daerah I (provinsi)

$n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah (pulau sumatera, pulau jawa)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Nilai Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi di Pulau Sumatera dan Provinsi di Pulau Jawa**

Adapun berdasarkan dari tujuan penelitian yang pertama, yaitu menghitung berapa besar nilai ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Besaran nilai indeks Williamson antar provinsi di pulau Sumatera dan Pulau Jawa tahun 2011-2024 seperti ditampilkan pada tabel. Berdasarkan dari hasil yang di tampilkan dapat dilihat provinsi dengan perkembangan Indeks Williamson tertinggi di pulau Sumatera tahun 2012 adalah Lampung yaitu sebesar 0,09% menunjukkan ketimpangan meningkat memungkinkan terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di daerah perkotaan. dan provinsi dengan indeks Williamson terendah adalah provinsi Riau sebesar -0,07% yang dimana penurunan ketimpangan cukup besar yang menandakan bahwa pemerataan antarwilayah membaik.

Selanjutnya Tahun 2013, provinsi dengan perkembangan indeks Williamson tertinggi di Pulau Sumatera adalah Sumatera Selatan sebesar 0,01%, hanya sedikit peningkatan, relative stabil. Lalu Provinsi dengan nilai yang terendah ada provinsi Bengkulu sebesar -0,14% yaitu terjadi penurunan ketimpangan yang mengindikasikan distribusi pembangunan semakin merata. Tahun 2014, provinsi dengan perkembangan indeks Williamson tertinggi di pulau sumatera yaitu provinsi Bengkulu

sebesar 0,14% ditahun sebelumnya menurun, namun ditahun ini Kembali mengalami peningkatan ketimpangan lagi secara signifikan. Sedangkan yang terendah ada provinsi Riau sebesar -0,09% penurunan terbesar, berarti secara pemerataan antarwilayah makin baik.

**Tabel 1.** Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2024

Tahun	Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera										
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kep. Riau	Jambi	Bengkulu	Sumatera Selatan	Kep. Bangka Belitung	Lampung	Pulau Sumatera
2011	0,458	0,442	0,256	0,563	0,533	0,531	0,412	0,484	0,180	0,237	0,489
Perkembangan %	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2012	0,443	0,456	0,254	0,525	0,528	0,513	0,415	0,494	0,182	0,259	0,472
Perkembangan %	-0,03	0,03	-0,01	-0,07	-0,01	-0,03	0,01	0,02	0,01	0,09	-0,03
2013	0,422	0,453	0,255	0,481	0,520	0,502	0,355	0,497	0,184	0,259	0,461
Perkembangan %	-0,05	-0,01	0,00	-0,08	-0,02	-0,02	-0,14	0,01	0,01	0,00	-0,02
2014	0,404	0,459	0,255	0,437	0,514	0,495	0,404	0,497	0,186	0,249	0,451
Perkembangan %	-0,04	0,01	0,00	-0,09	-0,01	-0,01	0,14	0,00	0,01	-0,04	-0,02
2015	0,411	0,466	0,257	0,419	0,507	0,488	0,405	0,525	0,191	0,276	0,434
Perkembangan %	0,02	0,02	0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,00	0,06	0,03	0,11	-0,04
2016	0,389	0,476	0,259	0,392	0,502	0,470	0,407	0,509	0,193	0,262	0,421
Perkembangan %	-0,05	0,02	0,01	-0,06	-0,01	-0,04	0,00	-0,03	0,01	-0,05	-0,03
2017	0,370	0,483	0,261	0,369	0,495	0,468	0,415	0,518	0,196	0,263	0,404
Perkembangan %	-0,05	0,01	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	-0,04
2018	0,354	0,490	0,264	0,350	0,464	0,468	0,404	0,525	0,199	0,264	0,390
Perkembangan %	-0,04	0,01	0,01	-0,05	-0,06	-0,03	-0,03	0,01	0,02	0,00	-0,04
2019	0,349	0,498	0,267	0,330	0,416	0,470	0,392	0,528	0,214	0,264	0,379
Perkembangan %	-0,01	0,02	0,01	-0,06	-0,10	0,00	-0,03	0,01	0,08	0,00	-0,03
2020	0,420	0,484	0,302	0,297	0,405	0,466	0,422	0,534	0,200	0,230	0,410
Perkembangan %	0,20	-0,03	0,13	-0,10	-0,03	-0,01	0,08	0,01	-0,07	-0,13	0,08
2021	0,491	0,453	0,305	0,284	0,400	0,447	0,423	0,529	0,186	0,241	0,409
Perkembangan %	0,17	-0,06	0,01	-0,04	-0,01	-0,04	0,00	-0,01	-0,07	0,05	0,00
2022	0,398	0,456	0,308	0,275	0,387	0,429	0,434	0,524	0,183	0,245	0,406
Perkembangan %	-0,19	0,01	0,01	-0,03	-0,03	-0,04	0,03	-0,01	-0,02	0,02	-0,01
2023	0,394	0,476	0,306	0,272	0,370	0,419	0,445	0,529	0,183	0,246	0,411
Perkembangan %	-0,01	0,04	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	0,03	0,01	0,00	0,00	0,01
2024	0,390	0,486	0,366	0,270	0,346	0,419	0,449	0,532	0,187	0,249	0,408
Perkembangan %	-0,01	0,02	0,20	-0,01	-0,06	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	-0,01
Rata-Rata	0,407	0,470	0,280	0,376	0,456	0,470	0,413	0,516	0,190	0,253	0,424
Keterangan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang

Sumber: (BPS, 2025b) & (BPS, 2025a)

Di tahun 2015 untuk perkembangan Indeks Williamson yang tertinggi adalah Sumatera selatan dengan nilai 0,06% sedangkan yang terendah yaitu provinsi Riau sebesar -0,04% yang mana dala hal ini terus menunjukkan penurunan ketimpangan berurut-turut. Tahun 2016 indeks perkembangan Williamson tertinggi yaitu provinsi Sumatera Utara 0,02%, dan yang terendah ada provinsi Aceh sebesar 0,05% dalam hal ini mengalami perbaikan pemerataan signifikan ditahun ini. Tahun 2017 provinsi dengan perkembangan indeks Williamson tertinggi provinsi Sumatera selatan sebesar 0,02% yaitu masih menunjukkan kenaikan ketimpangan meski kecil, sedangkan yang terendah ada provinsi Riau sebesar -0,06% Kembali mengalami penurunan ketimpangan cukup besar. Tahun 2018 untuk perkembangan indeks Williamson tertinggi yaitu provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 0,02%, dan yang terendah provinsi Kep. Riau sebesar -0,06% perbaikan signifikan dalam pemerataan pembangunan. Tahun 2019 provinsi dengan perkembangan indeks Williamson tertinggi provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 0,08%, dan yang terendah provinsi Kep. Riau sebesar -,10% menunjukkan pemerataan terus membaik. Tahun 2020 provinsi dengan perkembangan indeks Williamson yaitu provinsi Aceh sebesar 0,20%

lonjakan ketimpangan ini, kemungkinan akibat dampak ekonomi pandemic Covid-19. Lalu yang terendah ada provinsi Lampung sebesar -0,13% mengalami pemerataan ekonomi yang baik, meskipun pertumbuhan ekonomi melambat. Tahun 2021 indeks Williamson tertinggi provinsi Aceh sebesar 0,17% mengalami kembali kenaikan ketimpangan, memperkuat tren pasca pandemi, kemudian yang terendah provinsi Sumatera utara sebesar 0,06%. Tahun 2022 indeks Williamson tertinggi ditempati provinsi Bengkulu sebesar 0,03% sedikit meningkat masih stabil, lalu yang terendah yaitu provinsi Aceh -0,19% mencerminkan pemerataan meningkat tajam. Tahun 2023 untuk provinsi dengan indeks Williamson tertinggi ada provinsi Sumatera utara sebesar 0,03%, sedangkan yang terendah ada provinsi Bengkulu sebesar 0,04%. Tahun 2024 provinsi dengan indeks Williamson tertinggi yaitu provinsi Sumatera barat 0,20% lonjakan ketimpangan signifikan, dan yang terendah ada provinsi Kep. Riau sebesar 0,06%.

**Tabel 2.** Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Jawa 2011-2024

Tahun	Provinsi-Provinsi Pulau Jawa						
	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Pulau Jawa
2011	0,635	0,487	0,712	0,639	0,478	0,942	0,658
Perkembangan %	...	...	...	...	...	...	...
2012	0,640	0,492	0,711	0,641	0,478	0,945	0,661
Perkembangan %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,640	0,493	0,715	0,638	0,480	0,947	0,666
Perkembangan %	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2014	0,636	0,496	0,712	0,639	0,481	0,954	0,669
Perkembangan %	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2015	0,631	0,503	0,708	0,625	0,482	0,958	0,672
Perkembangan %	-0,01	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01
2016	0,629	0,509	0,705	0,621	0,482	0,958	0,675
Perkembangan %	0,00	0,012	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
2017	0,627	0,510	0,700	0,622	0,482	0,961	0,679
Perkembangan %	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018	0,628	0,512	0,700	0,619	0,477	0,966	0,682
Perkembangan %	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
2019	0,627	0,520	0,691	0,619	0,472	0,971	0,685
Perkembangan %	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00
2020	0,630	0,492	0,673	0,656	0,471	0,975	0,684
Perkembangan %	0,00	-0,05	-0,03	0,06	0,00	0,00	0,00
2021	0,634	0,486	0,733	0,655	0,472	0,982	0,684
Perkembangan %	0,01	-0,01	0,09	0,00	0,00	0,01	0,00
2022	0,633	0,489	0,735	0,653	0,470	0,994	0,685
Perkembangan %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2023	0,634	0,496	0,735	0,633	0,470	0,997	0,687
Perkembangan %	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
2024	0,636	0,502	0,734	0,650	0,470	1,002	0,689
Perkembangan %	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00
Rata-Rata	0,633	0,499	0,712	0,636	0,476	0,968	0,677
Keterangan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: (BPS, 2025b) & (BPS, 2025a)

Kemudian berdasarkan tabel 3. untuk Perkembangan Indeks Williamson Pulau Jawa, Tahun 2012 provinsi dengan Indeks Williamson tertinggi provinsi Banten dan DKI Jakarta sebesar 0,01% menunjukkan peningkatan ketimpangan ringan. Sedangkan provinsi lainnya stabil sebesar 0,00% dimana kondisi relative tidak berubah secara signifikan. Tahun 2013 untuk indeks Williamson tertinggi yaitu provinsi Jawa barat 0,01% terjadi sedikit peningkatan, untuk provinsi yang terendah tidak ada

yang menurun, semua relatif stabil. Tahun 2014 indeks tertinggi ada DKI Jakarta dan Jawa timur sebesar 0,01%, ketimpangan meningkat karena aktivitas ekonomi tetap terpusat di ibu kota. Sedangkan untuk provinsi terendah provinsi Bante sebesar -0,01%, menandakan pemerataan pembangunan mulai membaik di wilayah tersebut. Tahun 2015 untuk indeks Williamson tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 0,01%, dan yang terendah provinsi Jawa Tengah sebesar -0,02%. Tahun 2016 untuk indeks Williamson tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 0,01, dan yang terendah provinsi Jawa Tengah sebesar -0,01%. Tahun 2017 indeks Williamson beberapa provinsi stabil seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa timur sebesar 0,00%, dan yang terendah Jawa Barat sebesar -0,01%. Tahun 2018 untuk indeks Williamson tertinggi provinsi Jawa timur sebesar 0,01%, dan yang terendah Yogyakarta -0,01%. Tahun 2019 indeks Williamson tertinggi provinsi DKI Jakarta 0,02%, sedangkan yang terendah provinsi Jawa barat sebesar -0,01%. Tahun 2020 indeks Williamson tertinggi provinsi Jawa tengah sebesar 0,06%. Dan yang terendah ada DKI Jakarta sebesar -0,05%. Tahun 2021 untuk indeks Williamson tertinggi provinsi Jawa barat sebesar 0,09%, dan indeks yang terendah ada provinsi DKI Jakarta -0,01%. Tahun 2022 untuk indeks Williamson tertinggi provinsi DKI Jakarta dan Jawa timur sebesar 0,01% dan yang terendah tidak ada provinsi lain stabil di 0,00%. Tahun 2023 indeks Williamson tertinggi provinsi DKI Jakarta sebesar 0,01%, untuk yang terendah provinsi Jawa tengah -0,03%. Tahun 2024 indeks Williamson tertinggi provinsi Jawa tengah sebesar 0,03% dan yang terendah tidak ada dimana provinsi lain stabil 0,00%, kondisi dimana pemerataan relatif tidak berubah.

## **KESIMPULAN**

Hasil pengukuran menggunakan formulasi rumus Indeks Williamson (IW) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah antarprovinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa selama periode 2011–2024 bervariasi pada tiga kategori utama. Di Pulau Sumatera, provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau tergolong dalam kategori ketimpangan tinggi, yang berarti bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut belum merata. Kemudian, provinsi Aceh, Riau, Jambi, dan Bengkulu tergolong dalam kategori ketimpangan sedang, yang berarti bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut belum cukup merata. Sementara itu, provinsi Sumatera Barat, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, yang berarti bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut relatif merata. Adapun secara umum, ketimpangan di Pulau Sumatera berada pada kategori sedang, sedangkan Pulau Jawa tergolong tinggi, menandakan konsentrasi pembangunan ekonomi yang masih terpusat pada provinsi-provinsi tertentu seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Cetakan Pertama). UPP STIM YKPN.
- BPS. (2025a). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2025>
- BPS. (2025b). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YjJ0WGNERmxhMUV5UkdoflwSXJjRUo0ZERGalVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--miliar-rupiah---2022.html?year=2024>
- Kuncoro, M. (2020). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Edisi ke-7). UPP ATIM YKPN.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Cetakan ke-1). RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education Limited.